
PENGUATAN KELEMBAGAAN UNTUK PENINGKATAN POSISI TAWAR PETANI DALAM SISTEM PEMASARAN KAKAO

STRENGTHENING INSTITUTIONAL TO IMPROVE BARGAINING POSITION OF FARMERS IN COCOA MARKETING SYSTEM

* Dewi Listyati¹⁾, Agus Wahyudi²⁾, dan Abdul Muis Hasibuan¹⁾

¹⁾ **Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar**
Jalan Raya Pakuwon Km 2 Parungkuda, Sukabumi 43357 Indonesia
* *dewi_listyati@yahoo.com*

²⁾ **Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat**
Jalan Tentara Pelajar No 1, Bogor 16111 Indonesia

(Tanggal diterima: 20 Desember 2013, direvisi: 6 Januari 2014, disetujui terbit: 26 Februari 2014)

ABSTRAK

Kelembagaan petani kakao masih sangat lemah sehingga membuat posisi tawar petani menjadi lemah menghadapi sistem pasar yang ada. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelembagaan yang ada di sentra produksi kakao Sulawesi Tenggara serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan untuk meningkatkan posisi tawar petani dalam sistem pemasaran kakao. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-Oktober 2012 di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan metode survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat model kelembagaan, yaitu model Gapoktan Harapan Jaya (GHJ), Gapoktan Kakao Bina Karya (GKBK), Gapoktan Kakao Maju Makmur (GKMM), dan tanpa gapoktan (TGKT). Dari empat model tersebut, model GHJ telah berkembang menjadi koperasi dan lebih baik dari yang lainnya dalam menjalankan fungsinya, yaitu dalam pemilihan pengurus, pemberian *reward and punishment*, penyedia sarana produksi dan pembiayaan, serta pengolahan hasil dan pemasaran. Model ini berperan mengadvokasi petani agar melakukan proses fermentasi biji kakao melalui rangsangan selisih harga. Untuk lebih menguatkan posisi tawar petani, dikembangkan konsep Model Kelembagaan Kakao yang merupakan kemitraan antara organisasi petani dengan industri pengolahan serta beberapa elemen terkait lainnya, yaitu petani/kelompok tani/gapoktan/asosiasi petani, industri pengolahan kakao, lembaga pembiayaan, lembaga penyuluhan, pemerintah, perguruan tinggi/lembaga litbang dan instansi terkait. Dalam model ini, asosiasi petani memegang peran penting sebagai lembaga pemasaran bersama yang berada di tingkat Kabupaten untuk memperkuat posisi tawar petani terhadap industri pengolahan/eksportir.

Kata Kunci: Model kelembagaan, petani kakao, harga, industri, pengolahan kakao

ABSTRACT

Institutional cocoa farmers is still very weak that cause low bargaining position of farmers in existing market system. The objectives of this study were to analyze the existing institutional in Southeast Sulawesi as cocoa production centers and to formulate the institutional model in improving bargaining position of farmers in the cocoa marketing system. The survey conducted in June-October 2012 at Kolaka, Southeast Sulawesi Province. The results showed that there were four models of farmer's institution, namely Gapoktan Harapan Jaya (GHJ), Gapoktan Kakao Bina Karya (GKBK), Gapoktan Kakao Maju Makmur (GKMM) and no farmers group. Of the four models, GHJ models are better than the others in carrying out its functions such as the election of the board, giving reward and punishment, providing of agricultural inputs, financing, processing and marketing. This model had developed into a cooperative. In addition, this model also plays a role in advocating farmers to make the process of fermentation of cocoa beans, so that the price can be slightly higher than non-fermented, the price difference considered as the advantages for farmers. To strengthening the bargaining position of farmers, the concept of institutional models of cocoa which is a partnership between farmers and the processing industry organizations as well as several other institutions have been developed. At this model, farmers association has important roles to strengthen farmer's bargaining to the industrial/exporter.

Keywords: Institutional model, cocoa farmers, price, industry

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga setelah Pantai Gading dan Ghana. Kualitas kakao Indonesia tidak kalah dengan kakao dunia. Jika dilakukan fermentasi dengan baik maka kakao Indonesia dapat mencapai cita rasa setara dengan kakao yang berasal dari Ghana. Di samping itu, kakao Indonesia memiliki kelebihan tidak mudah meleleh sehingga cocok untuk *blending*. Indonesia juga memiliki keunggulan komparatif yang lebih baik dalam memproduksi biji kakao dibanding Pantai Gading, Ghana dan Nigeria (Rifin, 2013; Hasibuan, Nurmawati, & Wahyudi, 2012). Pada tahun 2010 produksi kakao Indonesia tercatat 837.918 ton, yang dihasilkan dari areal seluas 1.650.621 ha. Dari produksi tersebut, sebanyak 532.880 ton diekspor ke berbagai negara dengan nilai US\$ 1.643.725.550. Sebagian besar (78,21%) ekspor kakao dari Indonesia masih dalam bentuk biji, sedangkan sebagian kecil lainnya diekspor dalam bentuk kakao buah, pasta, *butter*, tepung, dan makanan yang mengandung coklat (Direktorat Jenderal Perkebunan [Ditjenbun], 2011). Sampai tahun 2012 Indonesia masih menduduki peringkat ketiga sebagai produsen kakao dengan produksi setara 833.310 ton biji dan total nilai ekspor 978 juta US Dollar (Direktorat Jenderal PPHP, 2013).

Indonesia berpeluang menjadi produsen utama kakao di tingkat dunia karena masih banyak daerah potensial untuk pengembangan kakao di samping yang sudah lama dikenal sebagai sentra kakao, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, dan Lampung. Perkebunan kakao di Indonesia sebagian besar (95 %) diusahakan oleh rakyat yang melibatkan 1.539.401 kepala keluarga petani. Namun demikian, produktivitas kakao perkebunan rakyat pada tahun 2010 hanya sebesar 793 kg/ha/tahun (lebih rendah dibandingkan tahun 2009 yaitu 811 kg/ha/th). Di lain pihak, produktivitas kakao perkebunan besar nasional dan swasta sedikit lebih baik, yaitu masing-masing 958 dan 944 kg/ha/tahun (Ditjenbun, 2011). Meskipun saat ini rata-rata produktivitas kakao masih di bawah 1 ton/ha, namun masih berpeluang untuk ditingkatkan karena potensi produksinya bisa mencapai 2 ton/ha (Rubiyo & Siswanto, 2012).

Rendahnya produktivitas kakao Indonesia menjadi kendala utama industri kakao nasional di samping rendahnya mutu (Wahyudi & Misnawi, 2007). Mutu produk kakao yang dihasilkan dari perkebunan rakyat sangat rendah, tidak difermentasi, serta banyak mengandung kotoran dan jamur. Meskipun demikian, biji kakao petani tetap terjual dengan posisi tawar yang rendah. Banyak petani tidak tertarik untuk

meningkatkan mutu melalui fermentasi biji kakao karena perlu tambahan waktu dan tenaga serta harga yang diterima dinilai petani tidak berbeda jauh dengan yang non-fermentasi. Proses fermentasi sebenarnya dapat meningkatkan harga jual yang berdampak pada peningkatan pendapatan petani secara keseluruhan (Indratmi & Chanan, 2011; Rifin, 2012). Proses fermentasi pada kakao menjadi tahap yang sangat penting karena merupakan salah satu kunci keberhasilan pengembangan kakao (Camu *et al.*, 2008).

Keinginan petani untuk bisa segera menerima pembayaran biji kakao menjadi salah satu kendala karena proses fermentasi dianggap terlalu lama. Hal tersebut juga didukung oleh keberadaan pedagang pengumpul yang memudahkan petani untuk menjual biji kakao dan dalam kondisi terdesak petani dapat meminjam dana atau barang dari pedagang pengumpul atau secara ijon. Menurut Said (2010), keterikatan petani dengan pedagang pengumpul melalui sistem ijon tersebut menyebabkan keberadaannya sulit dihilangkan di beberapa daerah sentra kakao. Hasil penelitian Abubakar, Yantu, & Asih (2013) menunjukkan keterikatan petani dengan pedagang sebagai bentuk kelembagaan informal yang menyebabkan kerugian bagi petani. Struktur dan perilaku pasar yang terbentuk cenderung mengarah pada struktur pasar oligopsoni, yaitu pedagang memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Salah satu upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut adalah penguatan kelembagaan di tingkat petani.

Kelembagaan petani sangat berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani (Anantanyu, 2011) karena kelembagaan memiliki ikatan yang sangat kuat dengan kondisi tekno-sosial petani (Suradisastira, 2008). Hidayanto, Supiandi, Yahya, & Amien (2009) menyebutkan bahwa pengembangan kelembagaan petani sangat penting karena beberapa alasan, yaitu (1) banyak masalah pertanian yang dapat diselesaikan oleh lembaga petani; (2) memberikan kontinuitas pada usaha penyebaran teknologi atau pengetahuan teknis kepada petani; (3) menyiapkan petani agar mampu bersaing dalam struktur ekonomi yang lebih terbuka; dan (4) adanya kerja sama petani yang dapat mendorong penggunaan sumberdaya petani menjadi lebih efisien. Namun demikian, kondisi yang terjadi adalah kelembagaan petani kakao masih sangat lemah sehingga membuat posisi tawar petani menjadi lemah menghadapi sistem pasar yang ada karena struktur pasar kakao di tingkat petani adalah oligopsoni (Sisfahyuni, Saleh, & Yantu, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan yang ada di sentra produksi kakao Sulawesi Tenggara serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan untuk

meningkatkan posisi tawar petani dalam sistem pemasaran kakao.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilaksanakan secara survey pada bulan Februari-Oktober 2012 di Kecamatan Ladongi dan Lambadia, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara yang ditentukan secara purposif dengan pertimbangan lokasi tersebut merupakan salah satu sentra produksi kakao. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) secara langsung kepada petani anggota kelompok tani, pengurus kelompok tani/gapoktan, pedagang pengumpul, pedagang besar, serta eksportir pada 4 model kelembagaan yang ada di lokasi penelitian. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *snowball sampling*. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, meliputi identitas kelompok yang terlibat dalam kelembagaan, aktivitas dan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kelembagaan, dan interaksi antar pihak-pihak yang terlibat dalam kelembagaan secara umum. Analisis juga dilakukan terhadap pola,

persamaan, dan perbedaan yang terdapat pada masing-masing jenis kelembagaan yang ditemukan di lokasi penelitian. Metode tersebut diadaptasi dari metode yang digunakan oleh Feenstra, Allen, Hardesty, Ohmart, & Perez (2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Kelembagaan yang Berkembang di Lokasi Penelitian

Kelembagaan petani pada suatu wilayah dibentuk oleh kemauan atau tekad untuk saling bekerja sama berdasarkan kesamaan jenis usaha dan tempat, dalam upaya meningkatkan skala usaha, efisiensi usaha, dan mendapatkan pembinaan serta fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraan petani kakao. Hasil *survey* di Kabupaten Kolaka, ditemukan setidaknya 4 (empat) model kelembagaan, yaitu Gapoktan Harapan Jaya (GHJ), Gapoktan Kakao Bina Karya (GKBK), Gapoktan Kakao Maju Makmur (GKMM), dan Tanpa Gapoktan (TGKT). Masing-masing model gapoktan kakao di Kabupaten Kolaka memiliki karakteristik atau profil yang spesifik (Tabel 1).

Tabel 1. Profil model kelembagaan petani kakao di Kabupaten Kolaka (2012)
Table 1. Profile models of cocoa farmer institutions in the District Kolaka (2012)

Uraian	Model GHJ	Model GKBK	Model GKMM	Model TGKT
Lokasi	Desa Pinanggosi, Kec. Lambadia	Desa Lembah Subur Kec. Ladongi	Desa Dangia, Kec. Ladongi	Desa Atula, Kec. Ladongi
Tanggal berdiri	7 April 2007	Oktober 2007	6 Juli 2007	-
Jumlah anggota (KK petani)	9 kelompok tani (155 KK petani)	11 kelompok tani (275 KK petani)	10 kelompok tani (200 KK petani)	-
Luas areal kakao binaan	350 Ha	1.800 Ha	500 Ha	-
Dasar pembentukan gapoktan	Persamaan jenis usaha (usahatani kakao) dan tempat	Kesamaan jenis usaha (usahatani kakao) dan tempat	Kesamaan jenis usaha (usahatani kakao) dan tempat	-
Fasilitas/Aset gapoktan	Gudang, lantai jemur, mesin pengering biji kakao, mesin sortasi, mesin pemecah buah, dan lain-lain dari bantuan.	-	-	-
Pengurus (berdasar pengalaman, pendidikan, potensi personal)	Melalui <i>fit and proper test</i> , psikotes dan pemilihan langsung oleh anggota	Pemilihan langsung oleh anggota	Pemilihan langsung oleh anggota	-
Hak anggota	Pemberian <i>reward and punishment</i> kepada anggota sudah mulai dilaksanakan	Pemberian <i>reward and punishment</i> kepada anggota belum terlaksana	Pemberian <i>reward dan punishment</i> kepada anggota sudah mulai dirintis (pemberian piagam penghargaan kepada anggota aktif dan berprestasi)	-

Keterangan/ Notes: GHJ = Gapoktan Harapan Jaya
GKBK = Gapoktan Kakao Bina Karya
GKMM = Gapoktan Kakao Maju Makmur
TGKT = Tanpa Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani

Kelembagaan agribisnis kakao yang ada di Kabupaten Kolaka tingkat kemajuannya sangat bervariasi, mulai dari sistem kelembagaan relatif lebih maju, hingga kelembagaan yang secara formal belum terbentuk atau model tanpa kelompok tani/gapoktan (Model TGKT). Karakteristik berbagai model kelembagaan di lokasi penelitian sebagai berikut:

1. Model Gapoktan Harapan Jaya (Model GHJ)

Model GHJ merupakan model kelembagaan yang selama ini dilakukan oleh Gapoktan Harapan Jaya dalam menjalankan agribisnis kakao yang berlokasi di Desa Pinanggosi, Kecamatan Lambadia, Kabupaten Kolaka. Berdasarkan model GHJ, Gapoktan Harapan Jaya merupakan pelaku utama dalam sistem kelembagaan dan berperan membangun interaksi serta komunikasi secara vertikal maupun horizontal. Gapoktan ini didirikan pada 7 April 2007 yang beranggotakan 9 kelompok tani, terdiri dari 155 kepala keluarga petani dengan luas areal kakao seluas 350 ha termasuk daerah binaannya. Aktivitas gapoktan mencakup pengadaan sarana produksi, pelatihan kepada petani, pengolahan, dan pemasaran biji kakao. Gapoktan ini juga sudah memiliki fasilitas-fasilitas fisik yang cukup memadai seperti gudang, lantai jemur, mesin pengering biji kakao, mesin sortasi, mesin pemecah buah, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang berasal dari bantuan berbagai pihak.

Ditinjau dari sisi perilaku kelembagaan, Gapoktan Harapan Jaya dibentuk berdasarkan kesamaan jenis usaha (usahatani kakao) dan tempat. Pengurus gapoktan ditetapkan melalui proses *fit and proper test*, psikotest, dan pemilihan langsung oleh anggota. Dengan demikian, posisi seseorang dalam kelompok ditentukan berdasarkan pengalaman, pendidikan, dan potensi personal. Pemberian *reward and punishment* kepada anggota juga sudah mulai dilaksanakan sehingga anggota bisa mendapatkan hak dan kewajiban secara lebih adil dalam sistem kelembagaan yang ada.

Model GHJ menempatkan Gapoktan Harapan Jaya, yang telah bertransformasi menjadi koperasi berbadan hukum, sebagai titik sentral dalam sistem kelembagaan yang ada (Gambar 1). Peran, fungsi, dan aktivitas dari masing-masing pihak yang terkait dalam kelembagaan kakao model GHJ sebagai berikut:

a) Petani

Pada kelembagaan kakao model GHJ, peran utama petani adalah menyediakan biji kakao sesuai standar mutu yang telah ditetapkan industri pengolahan kakao asing melalui gapoktan/koperasi. Standar mutu yang ditetapkan hanya terkait dengan kadar air dan ukuran biji kakao, sedangkan pengolahan kakao menjadi biji kakao fermentasi bukan merupakan hal yang mutlak.

Namun demikian, pengolahan kakao secara fermentasi tetap dianggap sangat penting dan diharapkan petani bersedia melakukan pengolahan untuk menghasilkan biji kakao fermentasi di masa yang akan datang. Biji kakao yang dihasilkan petani dan telah memenuhi standar mutu dijual kepada gapoktan/koperasi dengan harga Rp. 20.000,00/kg untuk biji kakao fermentasi dan Rp. 18.500,00/kg untuk biji kakao non-fermentasi. Harga tersebut sedikit lebih tinggi dari harga beli pedagang pengumpul di wilayah itu, yaitu Rp. 18.400,00/kg. Petani mendapat pembayaran langsung tunai pada saat serah terima barang. Jika petani menjual dalam volume yang banyak maka gapoktan akan menjemput ke tempat petani, sedangkan jika volumenya kecil maka petani harus mendatangi kantor/gudang gapoktan. Petani melalui kelompok tani mendapatkan: (i) bantuan sarana produksi seperti benih, pupuk, dan peralatan untuk pengolahan pasca panen kakao; (ii) informasi mengenai harga biji kakao terbaru, teknologi budidaya kakao, teknologi pengendalian hama dan penyakit, teknologi pengolahan kakao, dan informasi lainnya baik secara langsung atau melalui pelatihan-pelatihan dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelompok tani.

b) Kelompok Tani

Peran kelompok tani adalah sebagai perantara gapoktan dengan petani dalam hal: (i) penyampaian informasi harga biji kakao terbaru; (ii) penyampaian informasi teknologi budidaya kakao, pengendalian hama dan penyakit kakao, dan teknologi pasca panen melalui kegiatan penyuluhan (penyuluh pemerintah dan swadaya), pelatihan dan sekolah lapang, dan (iii) penyampaian saprodi.

c) Gapoktan/Koperasi

Model GHJ menempatkan Gapoktan Harapan Jaya, yang juga telah bertransformasi menjadi Koperasi Sejahtera, pada posisi yang sangat sentral dalam kelembagaan kakao di lokasi penelitian. Terkait dengan aliran biji kakao, gapoktan/koperasi berperan menampung biji kakao langsung dari petani, kemudian menjualnya kepada industri asing yang memiliki perwakilan di Kabupaten Kolaka. Gapoktan/koperasi menjual biji kakao fermentasi dan non-fermentasi kepada industri asing tersebut masing-masing seharga Rp. 21.120,00/kg dan Rp. 20.120,00/kg. Sebagian dari selisih antara harga jual dan harga beli digunakan untuk biaya sortasi dan pengangkutan yang digunakan oleh gapoktan/koperasi, sedangkan sebagian lagi dijadikan sebagai simpanan petani di gapoktan/koperasi yang akan diperhitungkan dalam sisa hasil usaha (SHU). Penjualan biji kakao kepada pihak industri juga dibayar tunai langsung sesuai dengan jumlah yang dijual. Informasi mengenai harga biji kakao yang dapat berubah

setiap saat selalu diinformasikan oleh pihak industri kepada gapoktan. Gapoktan kemudian menginformasikan kepada kelompok tani hingga akhirnya sampai kepada petani. Terkait dengan pemasaran biji kakao, gapoktan telah melakukan kemitraan dengan pihak industri asing yang memiliki perwakilan di Kabupaten Kolaka. Gapoktan/koperasi berkewajiban menjual biji kakao kepada industri asing tersebut sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, sedangkan pihak industri memberikan harga pembelian yang lebih tinggi kepada pihak gapoktan/koperasi sebesar Rp. 100,00/kg dibandingkan pembelian kepada pedagang. Aliran uang juga terjadi dengan bantuan modal dari pemerintah daerah yang dijadikan sebagai modal awal gapoktan/koperasi sebesar Rp. 100.000.000,00 dalam bentuk program LEM (lembaga ekonomi masyarakat). Aliran informasi juga diperoleh melalui pemerintah, baik pusat maupun daerah, melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan.

d) Industri pengolahan kakao asing

Industri pengolahan kakao asing yang dimaksud dalam model ini adalah perusahaan pengolahan kakao dari luar negeri yang mendirikan unit pengadaan bahan baku di Kabupaten Kolaka. Perusahaan tersebut mengumpulkan biji kakao dari dan untuk dikirim ke pabrik-pabrik pengolahan kakao di berbagai negara. Unit tersebut berperan sebagai eksportir yang

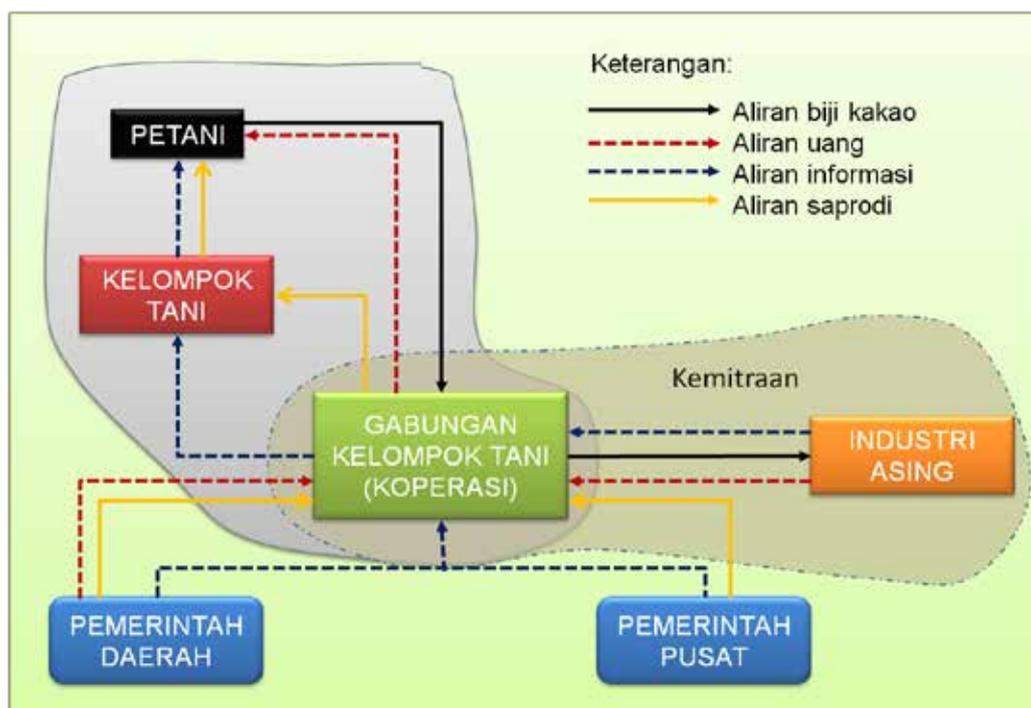
menampung biji kakao dari pedagang besar maupun gapoktan. Pada model GHJ, industri pengolahan kakao asing membeli biji kakao baik bentuk fermentasi maupun non-fermentasi dari gapoktan dan memberikan pembayaran tunai ketika biji kakao diterima di gudang. Industri menyampaikan informasi perkembangan harga kakao sesuai dengan perkembangan harga dunia kepada gapoktan untuk disesuaikan dengan harga pembelian kepada petani.

e) Pemerintah Daerah

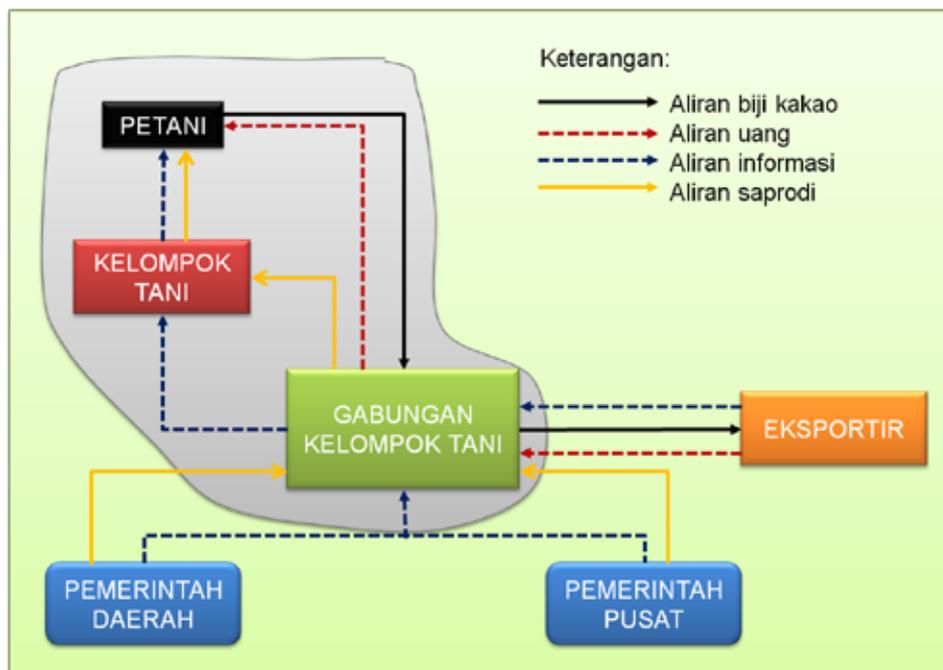
Peran pemerintah dalam sistem kelembagaan model GHJ adalah memberikan bantuan modal kepada gapoktan/koperasi melalui program LEM. Selain itu, berperan dalam penyediaan penyuluh pertanian dan sarana produksi pertanian.

f) Pemerintah Pusat

Gapoktan Harapan Jaya merupakan salah satu gapoktan yang terlibat dalam program Gerakan Nasional (Gernas) kakao yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Salah satu peran langsung dari pemerintah pusat dalam model GHJ ini adalah penyediaan sarana produksi, seperti pupuk, benih, pestisida, dan peralatan pengolahan pasca panen (mesin pengering dan lantai jemur). Terkait dengan aliran informasi, pemerintah pusat juga berperan dalam memberikan pelatihan-pelatihan langsung kepada petani mengenai sistem agribisnis kakao.



Gambar 1. Kelembagaan petani kakao dengan Model Gapoktan Harapan Jaya
Figure 1. Gapoktan Harapan Jaya Model on cocoa farmers institution



Gambar 2. Kelembagaan kakao dengan Model Gapoktan Kakao Bina Karya
Figure 2. Gapoktan Kakao Bina Karya Model on cocoa farmers institution

2. Model Gapoktan Kakao Bina Karya (Model GKKBK)

Model Gapoktan Kakao Bina Karya (Model GKKBK) merupakan model kelembagaan yang selama ini dilakukan dalam menjalankan agribisnis kakao yang berlokasi di Desa Lembah Subur, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka. Gapoktan Kakao Bina Karya didirikan pada Oktober 2007, beranggotakan 11 kelompok tani yang terdiri dari 275 kepala keluarga petani. Luas areal kakao yang termasuk dalam binaan gapoktan ini mencapai 1.800 ha. Aktivitas gapoktan mencakup pengadaan sarana produksi, pelatihan kepada petani, dan pemasaran biji kakao. Ditinjau dari sisi perilaku kelembagaan, gapoktan Kakao Bina Karya dibentuk berdasarkan kesamaan jenis usaha. Penetapan pengurus gapoktan dilakukan melalui pemilihan langsung oleh anggota. Pemberian *reward and punishment* kepada anggota juga belum terlaksana. Peran, fungsi, dan aktivitas masing-masing pihak yang terkait dalam kelembagaan kakao model GKKBK (Gambar 2) sebagai berikut:

a) Petani

Petani berperan dalam menyediakan biji kakao yang sesuai dengan standar mutu (kadar air dan ukuran biji) yang telah ditetapkan eksportir melalui gapoktan. Biji kakao yang dihasilkan petani dijual kepada gapoktan dengan harga Rp. 19.200,00/kg untuk biji kakao non-fermentasi. Pembayaran dilakukan secara tunai setelah biji kakao tersebut dijual kepada eksportir. Petani

melalui kelompoknya mendapatkan bantuan sarana produksi, seperti benih, pupuk, dan peralatan pengolahan pascapanen kakao. Selain itu, melalui kelompok tani, petani juga mendapatkan informasi mengenai harga biji kakao terbaru, teknologi budidaya kakao, teknologi pengendalian hama dan penyakit, teknologi pengolahan kakao dan informasi lainnya, baik langsung maupun melalui pelatihan-pelatihan dan penyuluhan.

b) Kelompok Tani

Kelompok tani berperan sebagai perantara Gapoktan dengan petani dalam hal penyampaian informasi harga, teknologi budidaya, dan pembagian bantuan sarana produksi yang berasal dari bantuan pemerintah, terutama terkait dengan Gernas kakao.

c) Gapoktan

Gapoktan berperan membantu menampung biji kakao langsung dari petani, kemudian menjualnya kepada eksportir di Kota Kolaka seharga Rp. 20.200,00/kg. Selisih antara harga jual dan harga beli, sebagian digunakan untuk biaya transportasi dan modal kelompok. Eksportir membayar secara tunai kepada gapoktan ketika biji kakao sampai di gudang eksportir. Gapoktan kemudian melakukan pembayaran kepada petani. Gapoktan tidak melakukan kegiatan pengolahan seperti sortasi, penjemuran atau yang lainnya sehingga berpeluang terjadi pengurangan/pemotongan bobot penjualan oleh eksportir sesuai mutu biji kakao yang

dijual. Informasi harga biji kakao yang dapat berubah setiap saat selalu disampaikan oleh eksportir kepada gapoktan, untuk dilanjutkan kepada kelompok tani hingga akhirnya sampai kepada petani. Aliran informasi juga diperoleh melalui pemerintah, baik pusat maupun daerah, melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan.

d) Eksportir

Eksportir berperan dalam pembelian biji kakao non-fermentasi dari gapoktan. Namun demikian, eksportir juga membeli biji kakao fermentasi dengan selisih harga Rp. 1.000,- sampai 1.500,-/kg dibanding biji kakao non-fermentasi.

e) Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah berperan dalam penyediaan penyuluh pertanian untuk mendampingi petani serta pemberian bantuan sarana produksi pertanian kepada petani melalui program-program dari instansi terkait.

f) Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat berperan dalam penyediaan sarana produksi, seperti pupuk, benih, pestisida, dan peralatan, karena gapoktan terlibat dalam program Gernas kakao yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

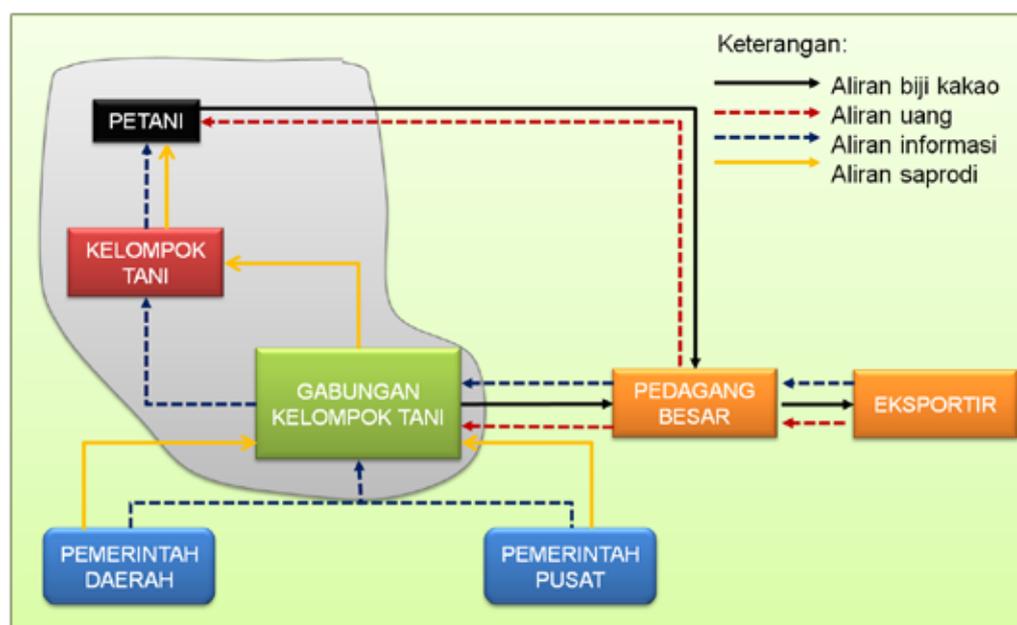
3. Model Gapoktan Kakao Maju Makmur (Model GKMM)

Model Gapoktan Kakao Maju Makmur (Model GKMM) adalah model kelembagaan agribisnis kakao yang berlokasi di Desa Dangia, Kecamatan Ladongi,

Kabupaten Kolaka. Gapoktan Kakao Maju Makmur berdiri pada 6 Juli 2007, beranggotakan 10 kelompok tani yang terdiri dari 200 kepala keluarga petani, dengan luas areal binaan mencapai 500 ha. Aktivitas gapoktan mencakup pengadaan sarana produksi, pelatihan untuk petani, dan pemasaran biji kakao. Gapoktan Kakao Maju Makmur dibentuk berdasarkan kesamaan jenis usaha dan tempat. Penetapan pengurus gapoktan dilakukan melalui pemilihan langsung oleh anggota. Pemberian *reward and punishment* kepada anggota sudah mulai dirintis dalam bentuk pemberian piagam penghargaan kepada anggota aktif yang berprestasi. Peran, fungsi, dan aktivitas dari masing-masing pihak yang terkait dalam kelembagaan kakao model GKMM (Gambar 3) sebagai berikut:

a) Petani

Peran petani adalah menyediakan biji kakao untuk dijual kepada pedagang besar, yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan gapoktan, dengan harga Rp. 18.500,00/kg. Seluruh biji kakao yang dihasilkan petani adalah biji kakao non-fermentasi. Petani melalui kelompok tani mendapatkan bantuan sarana produksi, seperti benih, pupuk dan peralatan untuk pengolahan pasca panen kakao. Selain itu, petani juga mendapatkan informasi mengenai harga biji kakao terbaru, teknologi budidaya kakao, teknologi pengendalian hama dan penyakit, teknologi pengolahan kakao dan informasi lainnya. Informasi tersebut diperoleh secara langsung maupun melalui pelatihan-pelatihan dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelompok tani.



Gambar 3. Kelembagaan petani kakao dengan Model Gapoktan Kakao Maju Makmur
Figure 3. Gapoktan Kakao Maju Makmur Model on cocoa farmers institution

b) **Kelompok Tani**

Kelompok tani berperan sebagai perantara antara gapoktan dengan petani dalam hal penyampaian informasi dan sarana produksi.

c) **Gapoktan**

Gapoktan berperan sebagai penghubung antara petani dengan pedagang besar dalam memasarkan biji kakao. Perubahan harga biji kakao diinformasikan oleh pedagang besar kepada gapoktan, kemudian gapoktan menginformasikannya kepada kelompok tani hingga sampai kepada petani.

d) **Pedagang Besar**

Peran pedagang besar adalah menampung biji kakao langsung dari petani, kemudian menjualnya kepada eksportir di Kota Kolaka. Pedagang besar menjual biji kakao yang belum difermentasi kepada eksportir seharga Rp. 20.200,00/kg. Selisih harga jual dan harga beli, sebagian digunakan untuk biaya sortasi dan penjemuran, biaya transportasi, dan keuntungan pedagang. Pembayaran dari eksportir kepada pedagang besar dilakukan secara tunai ketika biji kakao sampai di gudang eksportir.

e) **Eksportir**

Eksportir berperan dalam pembelian biji kakao non-fermentasi dari pedagang. Harga pembelian biji kakao disesuaikan dengan perkembangan harga kakao dunia dan nilai tukar rupiah. Perkembangan harga tersebut disampaikan oleh eksportir kepada pedagang besar untuk disesuaikan dengan harga pembelian kepada petani.

f) **Pemerintah Daerah**

Peran pemerintah daerah adalah dalam penyediaan penyuluh pertanian dan sarana produksi pertanian.

g) **Pemerintah Pusat**

Pemerintah pusat berperan melalui dukungan program Gernas kakao kepada petani.

4. Model Tanpa Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Model TGKT)

Variasi tingkat kemajuan kelembagaan agribisnis kakao yang ada di Kabupaten Kolaka sangat beragam, mulai dari sistem kelembagaan yang relatif lebih maju, maupun kelembagaan yang secara formal belum terbentuk. Model TGKT merupakan model kelembagaan agribisnis kakao, namun di tingkat petani tidak terbentuk kelompok tani/gabungan kelompok

tani. Model TGKT petani ini tidak memiliki keterikatan baik secara horizontal kepada petani lain, maupun secara vertikal pada lembaga-lembaga lainnya, seperti lembaga pemasaran (pedagang). Selain itu, aktivitas pengolahan kakao menjadi biji kakao fermentasi juga tidak ditemukan.

Pada model TGKT, petani bebas menjual biji kakao kepada pedagang pengumpul yang bersedia menampung biji kakao dari petani dalam berbagai bentuk, seperti biji basah, biji semi kering, dan biji kering. Biji kakao yang dijemur selama 1 hari, 2 hari, dan 3 hari, masing-masing dihargai Rp. 10.500,00/kg, Rp. 11.500,00/kg, dan Rp. 13.500,00/kg, sedangkan harga biji kakao kering non-fermentasi \pm Rp. 15.500,00/kg.

Rendahnya harga di tingkat petani berbanding lurus dengan taraf kesejahteraan petani kakao. Arsyad (2013) menyebutkan bahwa hal tersebut berkaitan dengan lemahnya peran dan koordinasi antar lembaga, sebagai indikasi kelembagaan petani yang lemah. Lembaga yang memiliki peran kunci dalam upaya penguatan kelembagaan petani adalah pemerintah daerah/dinas perkebunan, penyuluh perkebunan lapangan, dan lembaga pemasaran. Pendidikan dan pelatihan, yang mencakup pengelolaan pasca panen dan fermentasi, penyediaan input pertanian serta pemasaran sebagai sub elemen kunci dalam memperkuat kelembagaan, sangat penting dalam penguatan kelembagaan petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani kakao.

5. Perbandingan Antar Model

Berbagai model kelembagaan yang ditemukan di lokasi penelitian memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing (Tabel 2). Jika ditinjau dari luas areal usahatani kakao dan jumlah petani yang terlibat serta dari tingkat harga yang diterima petani secara langsung, model GKBK lebih baik dibandingkan model lainnya. Tetapi, jika dilihat dari tingkat harga yang diterima petani secara tidak langsung maka model GHJ berpotensi lebih baik dari model GKBK. Hal itu dikarenakan adanya simpanan petani dari selisih harga jual dan harga beli gapoktan terhadap biji kakao petani. Pengelolaan kelompok dalam model GKBK belum cukup baik akibat rendahnya kekompakan di antara anggota, khususnya yang tergabung dalam Gapoktan Kakao Bina Karya, serta terjadinya konflik dengan aparat desa. Selain itu, aktivitas kelompok/gapoktan dalam model GKBK lebih lemah dibandingkan GKMM meskipun model GKMM masih relatif lemah dari berbagai sisi kelembagaan yang dianalisis.

Tabel 2. Perbandingan antar model kelembagaan kakao
Table 2. Comparison between the models institution of cocoa farmers

No	Uraian	Model GHJ	Model GKKB	Model GKMM	Model TGKT
1	Jumlah petani (KK)	155 KK	275 KK	200 KK	-
2	Luas areal	350 ha	1.800 ha	500 ha	-
3	Aktivitas				
	a. Pengadaan saprodi	Baik	Sedang	Sedang	-
	b. Pengolahan	Sedang	Lemah	Lemah	-
	c. Pemasaran	Baik	Baik	Sedang	-
	d. Pelatihan	Baik	Baik	Baik	-
4	Permodalan	Baik	Sedang	Lemah	-
5	Sarpras	Baik	Lemah	Lemah	-
6	Pengelolaan kelompok	Baik	Sedang	Sedang	-
7	Konflik	Sedang	Tinggi	Sedang	-
8	Kerjasama	Baik	Baik	Lemah	-
9	Aktivitas fermentasi	Sedang	Lemah	Lemah	Lemah
10	Bantuan pemerintah				
	a. Fisik (modal, bangunan, peralatan)	Tinggi	Lemah	Lemah	Lemah
	b. Non fisik (pelatihan, dll)	Tinggi	Sedang	Tinggi	Lemah
11	Harga petani (Rp./kg)				
	a. Fermentasi	20.000*)	-	-	-
	b. Nonfermentasi	18.500*)	19.200	18.500	15.500

Keterangan: a) Model GHJ : Model Gapoktan Harapan Jaya
b) Model GKKB : Model Gapoktan Kakao Bina Karya
c) Model GKMM: Model Gapoktan Kakao Maju Makmur
d) Model TGKT: Model Tanpa Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani
*) Selisih harga penjualan dan pembelian gapoktan/koperasi dihitung sebagai simpanan petani dan tambahan modal gapoktan/koperasi dan diperhitungkan dalam pembagian sisa hasil usaha (SHU)

Note: a) GHJ Model : Gapoktan Harapan Jaya Model
b) GKKB Model: Gapoktan Kakao Bina Karya Model
c) GKMM Model: Gapoktan Kakao Maju Makmur Model
d) TGKT Model : Tanpa Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Model
*) The difference between the sales price and the purchase of gapoktan/cooperative counted as farmers savings and additional capital for gapoktan/cooperative, and would be considered as the distribution of net income (SHU)

Secara umum, model GHJ lebih baik dari model lainnya karena cenderung lebih matang dan terorganisir, serta berpotensi mampu menyejahterakan petani lebih baik dari model lainnya. Selain itu, model GHJ merupakan satu-satunya model yang ada di lokasi penelitian yang telah mampu menghasilkan biji kakao fermentasi secara konsisten. Hal ini terjadi karena komitmen gapoktan/koperasi untuk mendorong petani melakukan proses fermentasi kakao. Sistem yang ada pada kemitraan antara gapoktan/koperasi dengan industri pengolahan kakao asing juga mengindikasikan bahwa interaksi antar lembaga yang ada pada model tersebut berjalan dengan lebih baik.

Berdasarkan model-model kelembagaan yang sedang berkembang di masyarakat serta upaya pengembangan pengolahan kakao fermentasi di masyarakat, dapat dihasilkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Harga di tingkat petani sangat dipengaruhi oleh efektivitas dan efisiensi kelembagaan serta interaksi antar pihak yang terlibat dalam kelembagaan tersebut.
- b) Di samping rangsangan harga, dorongan kelompok tani/gapoktan terhadap aktivitas fermentasi biji kakao sangat penting untuk mengadvokasi petani melakukan proses fermentasi biji kakao.

Konsep Model Kelembagaan Kakao

Dalam sistem agribisnis kakao yang berjalan pada saat ini, kelembagaan yang menunjang kegiatan agribisnis kakao pada dasarnya sudah ada. Namun, kelembagaan tersebut mungkin tidak berjalan, berjalan namun tidak efektif, tidak ekonomis atau tidak adil bagi sebagian pihak yang terlibat dalam kelembagaan tersebut (Syahyuti, 2004). Dengan demikian, upaya yang harus dilakukan adalah revitalisasi atau pembaruan terhadap kelembagaan-kelembagaan tersebut agar dapat

berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu mencapai tujuannya. Syahyuti (2004) juga menyebutkan bahwa untuk mengembangkan kelembagaan, khususnya subsektor perkebunan yang mencakup komoditas kakao, perlu memperhatikan berbagai aspek, seperti (i) menciptakan iklim makro yang “sadar kelembagaan”, setiap individu selalu terikat kepada kelembagaan yang merupakan wadah beraktivitas setiap manusia; (ii) menjadikan kelembagaan sebagai objek, bukan individu karena kelembagaan secara fungsional menghidupkan sistem sosial; (iii) membangun kelembagaan baru; (iv) menggunakan dan memperkuat modal sosial yang berisikan kepercayaan (*trust*), norma yang dijalankan serta jaringan sosial (*social network*); dan (v) memperbaiki kelembagaan yang rusak.

Berbagai model kelembagaan yang ada pada sistem agribisnis kakao pada saat ini, khususnya di lokasi penelitian, masing-masing memiliki karakteristik yang diakibatkan oleh perbedaan dalam struktur sosial, ekonomi, politik, budaya, alam, dan lain-lain. Namun demikian, berdasarkan kajian terhadap kelembagaan-kelembagaan yang berkembang serta studi literatur maka disusun sebuah konsep Model Kelembagaan Kakao (Gambar 4). Model tersebut setidaknya melibatkan petani/kelompok tani/gapoktan/asosiasi petani, industri pengolahan kakao, lembaga pembiayaan, lembaga penyuluhan, perguruan tinggi/lembaga litbang dan instansi terkait (kebijakan). Peran dari masing-masing pelaku tersebut adalah:

a) Petani/ kelompok tani/ gapoktan (koperasi)/ asosiasi petani

Kegiatan pertanian berbasis agribisnis menjadi tidak berkembang di pedesaan karena beberapa hal, antara lain tingkat pengetahuan petani, kepemilikan modal, tidak ada kepastian pasar, dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu organisasi yang memiliki kesamaan misi dan tujuan. Dalam Model Kelembagaan Kakao, organisasi petani menjadi sangat penting, mulai dari petani sendiri secara individu, kelompok tani sebagai organisasi skala kecil, gapoktan sebagai organisasi di tingkat desa, dan asosiasi petani sebagai organisasi yang mewadahi gapoktan di tingkat kabupaten. Petani berperan sebagai pemilik perkebunan kakao yang menghasilkan buah kakao. Buah kakao kemudian diolah menjadi biji kakao fermentasi di tingkat kelompok tani.

b) Kelompok tani

Seperti yang telah disampaikan di atas, proses fermentasi biji kakao pada Model Kelembagaan Kakao dilakukan di tingkat kelompok tani. Oleh karena itu, seluruh peralatan untuk pengolahan buah kakao menjadi biji fermentasi, meliputi peralatan mesin pemecah buah,

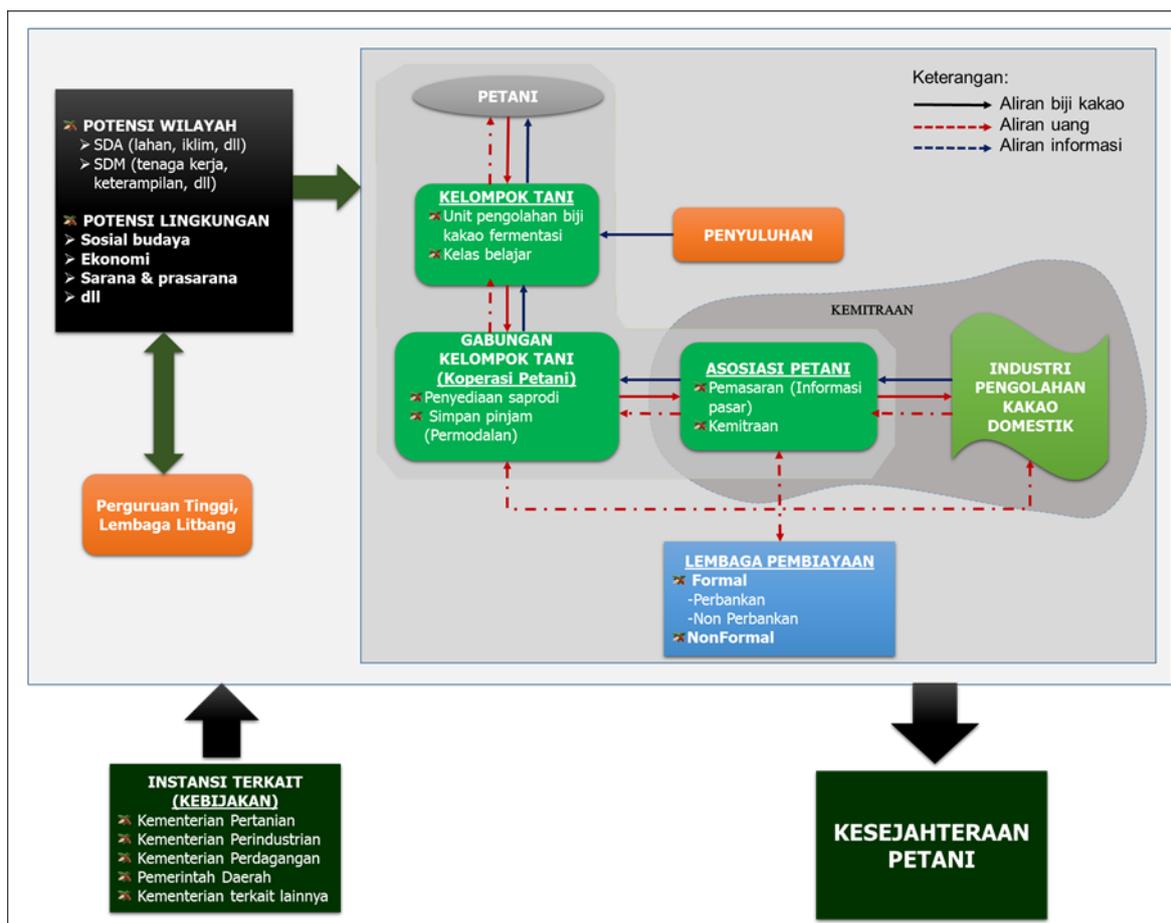
lantai jemur, mesin sortasi, mesin pengering, dan peralatan lainnya, dikelola di tingkat kelompok tani. Proses fermentasi biji kakao dilakukan di tingkat kelompok tani dengan pertimbangan efisiensi dan skala usaha. Dengan demikian, kelompok tani menghasilkan biji kakao fermentasi yang sesuai dengan standar mutu kebutuhan industri domestik. Keberadaan kelompok tani juga dijadikan sebagai kelas belajar mengenai sistem agribisnis kakao sehingga berhubungan langsung dengan kegiatan penyuluhan.

c) Gabungan kelompok tani (koperasi petani)

Kelompok-kelompok tani yang berada di satu desa harus membentuk gabungan kelompok tani (gapoktan) yang dapat ditransformasikan menjadi koperasi petani. Gapoktan/koperasi tersebut berperan sebagai penyedia sarana produksi usahatani kakao bagi petani/kelompok tani, seperti penyediaan pupuk, pestisida, benih, dan lain-lain. Selain itu, gapoktan/koperasi juga dapat berperan sebagai koperasi simpan pinjam untuk menghimpun dana dari anggota atau memberikan bantuan/tambahan modal bagi anggota/petani yang membutuhkan. Hal ini penting mengingat salah satu kendala yang sering terjadi dalam penerapan teknologi di tingkat petani adalah permodalan. Terkait dengan biji kakao fermentasi, gapoktan/koperasi berperan sebagai penyalur biji kakao dari tingkat kelompok tani kepada asosiasi petani. Gapoktan/koperasi dalam hal ini dapat juga berperan dalam menyediakan dana talangan untuk produksi biji kakao yang dihasilkan oleh petani/kelompok tani.

d) Asosiasi petani (Lembaga pemasaran bersama):

Dalam Model Kelembagaan Kakao, asosiasi petani dirancang untuk lebih berperan sebagai lembaga pemasaran bersama dari gapoktan-gapoktan yang tersebar di seluruh kabupaten. Keberadaan asosiasi petani menjadi sangat penting untuk dapat memenuhi skala kebutuhan industri pengolahan kakao domestik karena suplai dapat dilakukan oleh gapoktan-gapoktan yang ada di seluruh kabupaten. Asosiasi petani berperan dalam menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan pengolahan kakao domestik. Asosiasi petani berkewajiban untuk menyediakan biji kakao fermentasi sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh industri, sedangkan industri berkewajiban memberikan harga biji kakao yang bersaing untuk asosiasi petani. Selain itu, industri juga harus memberikan pembinaan kepada petani melalui asosiasi petani. Bentuk mitra usaha ini akan memberikan beberapa keuntungan kepada petani, antara lain (1) pasar produk pertanian bagi petani terjamin dan (2) petani terhindar dari risiko fluktuasi harga.



Gambar 4. Model Kelembagaan Kakao
 Figure 4. Institutional model of cocoa

e) Penyuluhan

Lembaga penyuluhan dalam Model Kelembagaan Kakao ini tetap memegang peranan yang sangat penting terutama dalam memberikan informasi teknologi kepada petani melalui kelompok tani, advokasi dan motivasi kepada petani mengenai budidaya kakao yang baik dan benar, serta proses pengolahan kakao fermentasi.

f) Industri pengolahan kakao

Sebagai salah satu industri prioritas nasional, industri pengolahan kakao domestik sudah mendapatkan berbagai kemudahan-kemudahan dari pemerintah. Salah satu insentif yang diberikan oleh pemerintah adalah bea ekspor kakao 0% hingga 15%, sesuai dengan harga di pasar internasional berdasarkan harga patokan dari New York Board on Trade (NYBOT). Selama tahun 2012, bea ekspor kakao yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 5%. Dengan demikian, industri pengolahan kakao dalam negeri pada dasarnya memiliki keunggulan bersaing dalam menetapkan harga. Dalam konsep

Model Kelembagaan Kakao, industri pengolahan kakao dalam negeri berperan menjalin kemitraan dengan asosiasi petani untuk memenuhi kebutuhan bahan baku yang mencukupi secara kualitas atau kuantitas. Ketepatan dan kecepatan waktu pembayaran oleh pihak industri menjadi sangat penting karena salah satu faktor utama yang menghambat kemitraan antara petani dengan industri adalah keterlambatan membayar oleh pihak industri. Hal ini menyebabkan industri pengolahan kakao dalam negeri kesulitan mendapatkan bahan baku karena petani lebih suka menjual kepada eksportir yang mampu memberikan pembayaran tunai secara langsung. Untuk itu, peran lembaga pembiayaan sangat dibutuhkan untuk memperlancar likuiditas keuangan perusahaan pengolahan kakao.

g) Lembaga pembiayaan

Permasalahan permodalan selalu menjadi masalah klasik yang menimpa pelaku-pelaku agribisnis. Peran lembaga pembiayaan sangat penting terutama memberikan bantuan modal kepada petani melalui

gapoktan/koperasi petani, menjamin pembayaran biji kakao kepada petani agar berjalan lancar, dan memenuhi kebutuhan fasilitas asosiasi. Bantuan permodalan dari lembaga pembiayaan kepada industri pengolahan kakao domestik juga sangat penting agar industri dapat berkembang dan bersaing dengan industri pengolahan kakao internasional.

h) Perguruan tinggi/lembaga litbang

Peran Perguruan Tinggi (PT) dan lembaga penelitian sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Peran PT ini memiliki tiga dimensi kekuatan, yaitu (i) menggali potensi wilayah sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya alam (SDA) termasuk kesesuaian lahan, ketersediaan lahan, serta komoditi unggulan daerah; (ii) mengetahui potensi lingkungan masyarakat pedesaan dan peluang usaha yang cocok dengan sosial budayanya termasuk ketersediaan prasarana dan sarana; dan (iii) merumuskan rekomendasi dari perpaduan dimensi pertama dan kedua kepada kelompok mitra usaha agribisnis. Di samping itu, sebagai lembaga independen, PT merupakan lembaga pemantau kegiatan agribisnis di pedesaan.

i) Instansi terkait

Keterlibatan pihak pemerintah dalam model kelembagaan agribisnis diharapkan hanya sebatas pembuat kebijakan dan pembinaan. Kebijakan mengenai ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ditujukan kepada semua pelaku agribisnis kakao, sedangkan pembinaan diberikan kepada kelompok tani, gapoktan/koperasi dan petani kakao. Instansi terkait juga dapat melakukan pembinaan kepada kedua kelompok tersebut dengan melibatkan tenaga profesional dari luar, baik dari perguruan tinggi maupun dari lembaga profesi lainnya.

Model Kelembagaan Kakao memungkinkan petani yang terlibat untuk memperoleh harga premium. Jika pada saat penelitian harga biji kakao non-fermentasi di tingkat eksportir Rp. 20.200,00/kg dan selisih harga dengan biji kakao fermentasi Rp. 1.500,00/kg, maka harga biji kakao fermentasi di tingkat eksportir adalah Rp. 21.700,00. Jika harga rata-rata biji kakao di pasar internasional mulai Januari-Agustus 2012 sebesar US\$ 2.341,26 per ton maka bea ekspor yang dikenakan adalah 5%. Jika kurs rata-rata selama periode Januari-Agustus 2012 sebesar Rp. 9.270,64/US\$, maka bea ekspor rata-rata yang ditanggung oleh eksportir adalah Rp. 1.085,25/kg.

Berdasarkan hasil wawancara dengan eksportir dapat diketahui bahwa bea ekspor tersebut tidak ditanggung oleh eksportir, melainkan dibebankan

kepada petani. Dengan demikian, industri pengolahan kakao domestik pada dasarnya memiliki keunggulan bersaing dalam menetapkan harga pembelian kepada petani. Pada skenario I, jika diasumsikan sebesar 50% keunggulan pembelian industri dari pengenaan bea ekspor digunakan untuk meningkatkan harga pembelian biji kakao fermentasi melalui Model Kelembagaan Kakao, maka harga biji kakao fermentasi di tingkat petani dapat mencapai Rp. 21.842,63/kg. Harga tersebut telah dikurangi biaya penanganan dan transportasi sampai tingkat asosiasi. Jika industri pengolahan domestik tidak bersedia meningkatkan harga beli dengan adanya bea ekspor (Skenario II) maka harga biji kakao di tingkat petani masih sebesar 21.300,00/kg. Jika harga biji kakao non-fermentasi di tingkat petani Rp. 18.500,00/kg maka dengan Model Kelembagaan Kakao diperoleh selisih Rp. 3.342,62/kg untuk skenario I dan Rp. 2.800,00/kg untuk skenario II. Dengan skenario I, tingkat harga pada dasarnya sudah memenuhi harapan petani karena berdasarkan hasil survei, petani tertarik untuk memproduksi biji kakao fermentasi apabila selisih harga kakao fermentasi dan non-fermentasi minimal Rp. 3.000,00/kg.

Model Kelembagaan Kakao dapat menjadi kelembagaan yang efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan jika mendapat dukungan dari seluruh pihak yang terkait dalam penguatan kelembagaan. Hermanto dan Swastika (2011) menyebutkan bahwa langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam penguatan kelembagaan petani di antaranya (i) mengembangkan kemampuan kerjasama petani di bidang ekonomi secara berkelompok; (ii) meningkatkan akses permodalan, posisi tawar, efisiensi dan efektivitas usahatani, fasilitas dan pembinaan organisasi kepada petani; dan (iii) meningkatkan kapasitas petani dan kelompok melalui kegiatan pendampingan dan pelatihan. Titus and Adefisayo (2012) menyebutkan bahwa kelembagaan petani harus didorong untuk mampu menciptakan nilai tambah, bahkan memunculkan lapangan pekerjaan baru. Di samping itu, Ngomane, Thomson, & Radhakrishna (2002) menyatakan bahwa kelembagaan petani akan lebih kuat jika mampu menjelaskan dan memperjuangkan kebutuhannya kepada pemerintah, sektor swasta, lembaga penelitian, lembaga pemasaran dan lembaga terkait lainnya. Namun demikian, Arsyad, Nuddin, & Yusuf (2013) mengingatkan bahwa implementasi dan pengelolaan kelembagaan merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan kelembagaan terutama dalam peningkatan kesejahteraan petani.

KESIMPULAN

Kelembagaan petani berperan dalam menyediakan sarana produksi pertanian dan permodalan, meningkatkan usahatani ke sektor hulu dan hilir, meningkatkan mutu hasil melalui fermentasi, melakukan pemasaran serta kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar dan kesejahteraan petani kakao selaku produsen. Bagi pemerintah, keberadaan kelembagaan petani memudahkan dalam pembinaan petani dan menjalankan program untuk meningkatkan produksi dan mutu kakao, serta pendapatan petani kakao. Dari beberapa model, kelembagaan yang ada di lokasi penelitian belum berperan seperti yang diharapkan. Peran kelembagaan petani, baik sebagai penampung biji kakao yang dihasilkan petani maupun sebagai penyedia bahan baku bagi industri pengolah kakao (asing) atau eksportir, dapat mengadvokasi petani untuk melakukan proses fermentasi biji kakao melalui pemberian selisih harga yang pantas. Dari beberapa model gapoktan di lokasi penelitian, model Gapoktan Harapan Jaya (GHJ) yang bertransformasi menjadi Koperasi Sejahtera merupakan model kelembagaan yang cukup baik dalam menjalankan agribisnis kakao. Agar petani banyak yang tertarik memproduksi biji kakao fermentasi dan memperoleh harga premium maka dikembangkan konsep Model Kelembagaan Kakao. Kelembagaan model ini merupakan kemitraan antara organisasi petani dengan industri pengolahan dan yang lainnya, yaitu petani/kelompok tani/gapoktan/asosiasi petani, industri pengolahan kakao, lembaga pembiayaan, lembaga penyuluhan, perguruan tinggi/lembaga litbang, dan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, I., Yantu, M.R., & Asih, D.N. (2013). Kinerja kelembagaan pemasaran kakao biji tingkat petani perdesaan Sulawesi Tengah: Kasus Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. *e-J. Agrotekhnis*, 1(1), 74-80.
- Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan petani: Peran dan strategi pengembangan kapasitasnya. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (SEPA)*, 7(2), 102-109.
- Arsyad, M. (2013). Penguatan kelembagaan menuju kesejahteraan petani. *Paper presented at Simposium Nasional Ekonomi Kakao*. Kendari, 12-13 Februari 2013: PERHEPI-Universitas Haluoleo. Retrieved from <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/3231>
- Arsyad, M., Nuddin, A., & Yusuf, S. (2013). Strengthening institutional towards smallholders welfare: Evidence from existing condition of cocoa smallholders in Sulawesi, Indonesia. *Ryukoku Journal of Economic Studies*, 52(1), 71-86.
- Camu, N., Winter, T.D., Addo, S.K., Takrama, J.S., Bernart, H. & Vuyst, L.D. (2008). Fermentation of cocoa beans: Influence of microbial activities and polyphenol concentrations on the flavour of chocolate. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 88: 2288-2297.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2011). *Statistik Perkebunan Indonesia 2010-2012: Kakao* (p. 53). Jakarta: Ditjenbun Kementan.
- Direktorat Jenderal PPHP. (2013). *Mentan membuka resmi sidang ICCO tgl 18-22 Maret 2013 di Bali*. Retrieved from http://pphp.deptan.go.id/berita/0/mentan_membuka_re_smi_sidang_icco_2013.html
- Feenstra, G., Allen, P., Hardesty, S., Ohmart, J., & Perez, J. (2011). Using a supply chain analysis to assess the sustainability of farm-to-institution program. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*, 1(4), 69-84.
- Hasibuan, A.M., Nurmalina, R., & Wahyudi, A. (2012) Analisis kinerja dan daya saing perdagangan biji kakao dan produk kakao olahan Indonesia di pasar internasional. *Buletin Riset Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri*, 3(1), 57-70.
- Hermanto, & Swastika, D.K.S. (2011). Penguatan kelompok tani: Langkah awal peningkatan kesejahteraan petani. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(4), 371-390.
- Hidayanto, M., Supiandi, S., Yahya, S., & Amien, L.I. (2009). Analisis keberlanjutan perkebunan kakao rakyat di kawasan perbatasan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Agro Ekonomi*, 27(2), 213-229.
- Indratni, D. & Chanan, M. (2011). Pendampingan pengendalian hama terpadu dan penanganan pasca panen kakao pada kelompok tani kakao Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. *Jurnal Dedikasi*, 8, 68-73.
- Ngomane, T., Thomson, J.S., & Radhakrishna, R.B. (2002). Public Sector Agricultural Extension System in the Northern Province of South Africa: A system undergoing transformatif. *Journal of International Agricultural and Extension Education*, 9(3), 31-37.
- Rifin, A. (2012). *Impact of export tax policy on cocoa farmers and supply chain*. SEADI Discussion Paper No. 1.
- Rifin, A. (2013). Competitiveness of Indonesia's cocoa beans export in the world market. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 4(5), 279-281.
- Rubiyo & Siswanto. (2012). Peningkatan produksi dan pengembangan kakao (*Theobroma cacao* L.) di Indonesia. *Buletin Riset Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri*, 3(1), 33-48.
- Sa'id, E. G. (2010). Review kajian, penelitian dan pengembangan agroindustri strategis nasional: Kelapa sawit, kakao dan gambir. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 19(1), 45-55.
- Sisfahyuni, Saleh, M.S., & Yantu, M.R. (2011). Kelembagaan pemasaran kakao biji di tingkat petani Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Agro Ekonomi*, 29(2), 191-216.

Suradisastra, K. (2008). Strategi pemberdayaan kelembagaan petani. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 26(2), 82-91.

Syahyuti. (2004). *Kelembagaan di dunia pertanian: Analisa sosiologis terhadap konsep, hasil-hasil penelitian, dan strategi pengembangannya*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

Titus, O.B., & Adefisayo, B.A. (2012). Institutional and technical factors influencing sustainable agricultural practices in Nigeria. *International Journal of Science and Technology*, 1 (11), 609-621.

Wahyudi, T., & Misnawi. (2007). Fasilitas perbaikan mutu dan produktivitas kakao Indonesia. *Warta Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia*, 23(1), 32-43.